



Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Etika Profesional terhadap Keterbukaan Laporan Keuangan

Annisa Maudy Haliza
Universitas PGRI MPU SINDOK
(maudyannisa058@gmail.com)

Abstrak

Perusahaan publik memiliki tanggung jawab untuk mengomunikasikan kinerja dan kondisi keuangannya secara jujur dan dapat dipercaya. Namun, dalam praktiknya keterbukaan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh nilai-nilai internal seperti komitmen terhadap etika dan kultur tata kelola yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan etika profesional terhadap keterbukaan laporan keuangan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih adanya praktik pelaporan keuangan yang kurang transparan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan stakeholder terhadap informasi yang disajikan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang diinterpretasikan melalui kalimat. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara kepada responden dan kuesioner dalam hal ini adalah akuntan, auditor, dan manajemen keuangan di perusahaan publik di Indonesia, didapatkan informan 8 orang yang dijadikan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan etika profesional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterbukaan laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan pentingnya integritas individu dan sistem tata kelola yang kuat untuk mendorong pelaporan yang jujur dan transparan.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Etika Profesional, Keterbukaan Laporan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas.

Abstract

Public companies have a responsibility to communicate their performance and financial condition honestly and reliably. However, in practice, financial statement transparency is not only determined by regulations but also by internal values such as a commitment to ethics and a strong governance culture. This study aims to analyze the influence of corporate governance and professional ethics on financial statement transparency. The main problem in this study is the persistence of less transparent financial reporting practices, which has the potential to reduce stakeholder trust in the information presented by the company. This study uses a quantitative method, namely data relating to numbers that still require processing and analysis for research purposes. The data used is primary data through the distribution of questionnaires to respondents, in this case accountants, auditors, and financial management in public companies in Indonesia. The sampling method used a purposive sampling method and obtained 50 respondents as a sample. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The results show that corporate governance and professional ethics have a significant positive influence on financial statement transparency. These findings demonstrate the importance of individual integrity and a strong governance system to encourage honest and transparent reporting

Keywords: Corporate Governance, Professional Ethics, Financial Disclosure, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks, keterbukaan laporan keuangan menjadi aspek fundamental yang menentukan kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan, khususnya perusahaan *go public*. Transparansi dalam penyampaian informasi keuangan tidak hanya mencerminkan integritas perusahaan, tetapi juga menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional (Bushman & Smith, 2003). Namun, berbagai skandal akuntansi global seperti Enron, WorldCom, dan kasus PT Garuda Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memenuhi

persyaratan pelaporan secara formal, informasi yang diungkap sering kali tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan (GCG) dan etika profesional sebagai pilar utama yang mendasari praktik pelaporan yang jujur dan akuntabel (Michelon & Parbonetti, 2012; Hapsari & Dewi, 2023).

Peran *corporate governance* (seperti dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional) sangat penting dalam memastikan transparansi (OECD, 2015). Sementara itu, etika profesional akuntan-prinsip integritas, objektivitas, dan kerahasiaan-menjadi benteng terakhir dalam mencegah kecurangan (*fraud*) (IFAC, 2022). Implementasi *good corporate governance* memberikan peran besar dalam pengambilan keputusan yang merupakan tata kelola perusahaan sudah menjadi suatu keharusan untuk diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Selain untuk mengendalikan, dan menjamin kelangsungan perusahaan, *good corporate governance* yang baik juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan serta mempengaruhi kualitas keputusan para investor dalam menilai sebuah perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan penentu penting kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat merusak kepentingan pemegang saham, dan dapat menyebabkan keruntuhan bisnis (Li *et al.*, 2021). Demi mencapai tata kelola yang baik perusahaan diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola *good corporate governance* yang kuat memiliki lima prinsip, yaitu keadilan, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan independensi (Burak *et al.*, 2017)

Penelitian Fuadah & Setiyawati (2020) menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan informasi laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widyaningsih (2010) yang menemukan bahwa transparansi pelaporan keuangan adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan juga bahwa transparansi laporan keuangan adalah keadaan dimana terciptanya keterbukaan yang ada pada sebuah perusahaan mengenai ringkasan dari informasi keuangan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Namun, meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh *corporate governance* dan etika terhadap kualitas laporan keuangan, masih terdapat *research gap* terkait bagaimana interaksi kedua faktor ini secara kuantitatif memengaruhi tingkat pengungkapan (*disclosure*) pada perusahaan *go public* di Indonesia.

Penelitian ini penting karena perusahaan publik memiliki tanggung jawab untuk mengomunikasikan kinerja dan kondisi keuangannya secara jujur dan dapat dipercaya. Namun, dalam praktiknya keterbukaan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh nilai-nilai internal seperti komitmen terhadap etika dan kultur tata kelola yang kuat (Adams, 2004; Kaptein & Schwartz, 2008). Tetapi, belum banyak studi di Indonesia secara mendalam mengeksplorasi bagaimana pihak manajemen dan auditor memahami dan menerapkan prinsip GCG dan etika dalam proses pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulistiowati (2025) yang menemukan adanya tantangan signifikan dalam implementasi penerapan etika akuntansi yang konsisten, termasuk potensi konflik kepentingan, praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta lemahnya budaya organisasi terhadap etika. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai etis dalam praktik akuntansi publik menjadi krusial untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Regulasi seperti POJK No. 29/POJK.04/2016 menekankan keterbukaan informasi harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan tidak menyesatkan. Namun, praktiknya seringkali bersifat simbolik (*compliance-oriented*),

bukan nilai substantif. Maka, pemahaman kontekstual terhadap persepsi dan praktik pelaporan menjadi sangat relevan dan hanya dapat ditelusuri melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana manajemen dan auditor internal memahami peran tata kelola perusahaan dalam mendorong keterbukaan laporan keuangan, serta menggali persepsi mereka terhadap penerapan etika profesional dalam proses pelaporan. GCG mengatur transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal. Sementara itu, etika profesional menjadi dasar moral dalam pengambilan keputusan pelaporan yang tidak hanya legal, tetapi juga etis. Interaksi antara GCG dan etika ini diyakini membentuk kualitas pelaporan yang tidak semata-mata berfokus pada angka, tetapi pada nilai-nilai integritas dan akuntabilitas perusahaan.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada minimnya pendekatan kuantitatif yang secara spesifik menggali pengaruh tata kelola perusahaan melalui pemahaman pelaku internal dan implementasi prinsip-prinsip GCG dan etika dalam aktivitas pelaporan keuangan. Sebagian besar studi sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada referensi literatur, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, serta dokumen peraturan yang relevan seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulistiowati dkk, 2025 tentang “Transparansi Keuangan Daerah: Mengapa Etika Akuntansi Penting?”. Padahal, aspek persepsi, keyakinan, dan proses pengambilan keputusan di balik layar juga membutuhkan pendekatan kuantitatif yang lebih eksploratif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kuantitatif untuk memahami persepsi dan pengalaman manajer serta auditor internal. Penelitian ini tidak hanya menjawab keterbatasan studi kuantitatif sebelumnya, tetapi juga menyajikan narasi dan pemaknaan pelaku internal terhadap nilai-nilai GCG dan etika profesional dalam pelaporan keuangan perusahaan *go public*. Kajian literatur menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik secara signifikan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan (Bushman & Smith, 2003; Michelon & Parbonetti, 2012). Etika profesional juga memperkuat pengambilan keputusan akuntansi yang objektif dan jujur (Kaptein & Schwartz, 2008; Ananda & Mardijuwono, 2022). Namun, sedikit penelitian yang menyelidiki bagaimana kedua aspek ini berinteraksi dalam praktik keseharian perusahaan. Melalui wawancara mendalam dan studi kasus, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pemahaman kontekstual dan aplikatif dalam pengelolaan pelaporan perusahaan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu guna memperkuat dasar teoritis dari topik yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, variabel-variabel yang dikaji meliputi tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*), etika profesional, dan keterbukaan laporan keuangan. Ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam kerangka tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, khususnya di lingkungan perusahaan *go public*.

1. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan (GCG) didefinisikan sebagai seperangkat sistem, prinsip, dan mekanisme yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan seperti dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2015). GCG bertujuan untuk menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*).

2. Etika Profesional

Etika profesional dalam akuntansi merujuk pada prinsip moral yang mengatur perilaku akuntan dan auditor dalam menjalankan tugasnya secara jujur, objektif, dan profesional. International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) menyebutkan lima prinsip

utama dalam etika profesional: integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (IFAC, 2022).

3. Keterbukaan Laporan Keuangan

Keterbukaan laporan keuangan mengacu pada sejauh mana informasi keuangan yang disajikan perusahaan dapat diakses, dipercaya, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Konsep ini penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, efisiensi pasar, dan akuntabilitas perusahaan (Bushman & Smith, 2003).

4. Teori yang Mendukung

Penelitian ini didasari oleh Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan antara satu atau lebih orang dengan melibatkan orang lain untuk mengerjakan beberapa tugas dan layanan atas nama mereka dalam hubungan kerja sama yang berbentuk kontrak dan melibatkan beberapa delegasi dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan termasuk para pemegang saham. Manajemen sebagai pihak pengelola cenderung lebih mengetahui informasi terkait dengan pengelolaan perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham. Akibat adanya informasi asimetri, pemegang saham tidak selalu percaya dengan informasi yang disampaikan oleh manajer (Geno & Firmansyah, 2022). Oleh karena manajemen dapat melakukan tindakan yang merugikan pihak *principal* demi keuntungan diri sendiri, misal untuk memperoleh kompensasi yang besar. Tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam menciptakan budaya kesadaran, transparansi, dan keterbukaan perusahaan (Al-ahdal *et al.*, 2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bushman dan Smith (2003) yang menekankan sistem *good corporate governance* yang kuat berperan krusial dalam mendorong pengungkapan informasi keuangan berkualitas.

5. Penelitian Terdahulu

- a. Bushman dan Smith (2003) menyatakan bahwa sistem GCG yang kuat mendorong peningkatan pengungkapan informasi dan menurunkan asimetri informasi antara manajemen dan investor.

Bushman dan Smith (2003) menekankan bahwa sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang kuat memainkan peran krusial dalam mendorong pengungkapan informasi keuangan yang berkualitas. Dalam kerangka teori agensi, pengungkapan informasi menjadi alat utama untuk mengurangi *information asymmetry* antara manajemen (agen) dan investor (prinsipal). Ketika perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan.

- b. Integritas auditor merupakan elemen sentral dalam profesi audit. Arens *et al.* (2012) menggarisbawahi bahwa lemahnya integritas auditor menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan audit, yang mencuat dalam skandal besar seperti Enron dan WorldCom. Dalam konteks ini, profesionalisme dan etika memainkan peran penting dalam menjamin keterandalan laporan audit dan mencegah konflik kepentingan antara auditor dan klien.

Arens *et al.* (2012) menjelaskan bahwa lemahnya integritas auditor menjadi salah satu penyebab utama kegagalan audit di kasus-kasus besar seperti Enron dan WorldCom.

- c. Studi oleh Ho dan Wong (2001) menemukan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih tersebar dan dewan komisaris yang lebih independen memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi secara transparan. Hal ini selaras dengan prinsip GCG yang mendorong pengawasan manajerial oleh pihak independen sebagai cara untuk menjaga kepentingan pemegang saham.

Ho & Wong (2001) menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih transparan dan dewan yang lebih independen cenderung memiliki tingkat keterbukaan yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan pengaruh tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan etika profesional terhadap keterbukaan laporan keuangan. Menurut Resseffendi (2010:33), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau kuesioner mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui kuesioner dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasan pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian ini adalah karena variabel yang diamati memerlukan perhitungan matematis untuk menunjukkan hubungan antarvariabel.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelaporan keuangan dan pengawasan tata kelola perusahaan, seperti manajer keuangan, auditor internal, komite audit, dan sekretaris perusahaan dari perusahaan *go public*. Sugiyono (2018:137-138) wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menyampaikan pandangan dan pengalaman secara leluasa, namun tetap terarah pada fokus penelitian. Selain wawancara, peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2018:124), kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kesepakatan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Data primer dipilih karena hanya melalui eksplorasi langsung terhadap pelaku internal, peneliti dapat menangkap persepsi yang autentik, refleksi personal, serta keputusan etis yang tidak tercermin dalam laporan formal. Sedangkan data sekunder digunakan untuk memvalidasi dan memperkaya informasi, serta membantu triangulasi data (Yin, 2018).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Braun dan Clarke (2006), proses analisis tematik dilakukan melalui enam tahapan sistematis berikut:

- a. Mengenal data secara mendalam (*familiarizing with the data*): tahap ini dilakukan dengan mentranskripsi data wawancara secara lengkap, membaca data berulang kali, dan membuat catatan awal atas ide-ide penting yang muncul.
- b. Menghasilkan kode awal (*generating initial codes*): peneliti mengidentifikasi dan mengode bagian-bagian data yang relevan, yaitu potongan teks yang memiliki makna terhadap fokus penelitian.

- c. Mencari tema (*searching for themes*): kode-kode yang telah dibuat kemudian dikelompokkan ke dalam kategori atau tema yang bermakna.
- d. Meninjau tema (*reviewing themes*): tema yang terbentuk kemudian ditinjau ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan data dan hubungan antar kode.
- e. Mendefinisikan dan menamai tema (*defining and naming themes*): menjelaskan secara konseptual, termasuk batasan dan hubungan tiap tema dengan tema lainnya.

Menyusun laporan (*producing the report*): tahapan terakhir adalah menyusun narasi tematik berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta mendukungnya dengan kutipan langsung dari data partisipan.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengenal data secara mendalam, menghasilkan kode awal, mencari tema, meninjau tema dan mendefinisikan tema barulah dilakukan interpretasikan pola-pola tema dalam data wawancara secara sistematis. Analisis tematik menurut Braun dan Clarke (2006) adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data. Lebih dari sekadar menyusun atau merangkum data, analisis tematik memungkinkan peneliti untuk memahami makna kolektif yang muncul dari pengalaman peserta dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Analisis ini tidak terikat oleh teori tertentu (*theory-free*), sehingga fleksibel digunakan dalam berbagai pendekatan kualitatif, termasuk fenomenologi, naratif, dan *grounded theory* (Braun & Clarke, 2006).

3.5 Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data (validitas dan reliabilitas kuantitatif), penelitian ini mengikuti kriteria trustworthiness dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu:

- a. *Credibility*: Dicapai melalui triangulasi sumber (manajer keuangan, auditor internal, komite audit) dan *member checking*.
- b. *Transferability*: Dideskripsikan secara rinci konteks penelitian sehingga memungkinkan generalisasi terbatas (analitik).
- c. *Dependability*: Proses pengumpulan dan analisis data dicatat dalam audit trail.
- d. *Confirmability*: Temuan didasarkan pada data, bukan bias peneliti.

Tema Utama	Deskripsi Singkat	Kutipan Representatif	Referensi
GCG Simbolik	Penerapan GCG cenderung bersifat formalitas administratif tanpa penghayatan nilai transparansi sejati.	“Rapat komisaris hanya untuk checklist regulasi.”	Michelon & Parbonetti (2012); DiMaggio & Powell (1983); Utama (2019)
Etika sebagai Batas Moral	Keputusan pelaporan dipengaruhi oleh nilai moral dan etika individu, terutama saat menghadapi tekanan internal.	“Saya tahu bisa disesuaikan, tapi saya pribadi tidak nyaman.”	Adams & McNicholas (2007); Rest (1986); Suryanto & Kisman (2020)
Transparansi sebagai Citra	Transparansi dijalankan untuk membentuk persepsi pasar, bukan pengungkapan jujur dan menyeluruh.	“Yang penting informasi kelihatan bagus.”	Bushman & Smith (2003); Ho & Wong (2001)

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh tata kelola perusahaan dan etika profesional memengaruhi keterbukaan laporan keuangan pada perusahaan

go public di Indonesia. Melalui analisis terhadap data hasil wawancara dengan informan dan hasil kuesioner mendalam dengan manajemen keuangan, auditor internal, dan anggota komite audit di beberapa perusahaan terbuka, diperoleh beberapa hasil temuan utama yang menjadi temuan kunci dalam penelitian ini. Temuan ini tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga mengungkap makna tersembunyi di balik praktik pelaporan keuangan yang dijalankan oleh pelaku internal perusahaan.

Temuan 1: Tata Kelola Perusahaan sebagai Alat Simbolik, Bukan Substansial

Peneliti menemukan bahwa banyak perusahaan publik menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara formal, namun belum menjalankannya secara substansial dalam pelaporan keuangan. Hal ini dilihat dari pernyataan seorang Komite Audit mengungkapkan bahwa “rapat dewan komisaris dan komite audit sering dilakukan hanya sebatas memenuhi kewajiban regulasi, bukan forum nyata untuk mendorong transparansi.” Temuan ini menunjukkan GCG sebagai ritual administratif, bukan sebagai sistem pengendalian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michelin dan Parbonetti (2012) yang menyatakan bahwa banyak perusahaan, pelaksanaan GCG cenderung bersifat simbolis dan belum menembus struktur pengambilan keputusan aktual. Selain itu, hal ini juga menguatkan teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983) yang menjelaskan organisasi sering kali meniru praktik formal dari perusahaan lain untuk memperoleh legitimasi tanpa adanya perubahan substantif. Ketika GCG hanya sebagai formalitas, maka fungsi pengawasan dan akuntabilitasnya menjadi lemah. Akibatnya, keterbukaan laporan keuangan yang semestinya dijaga oleh struktur GCG menjadi rentan terhadap praktik rekayasa atau pengaburan informasi yang krusial bagi pemangku kepentingan.

Temuan 2: Etika Profesional sebagai Batas Moral dalam Pelaporan Keuangan

Dalam wawancara dengan auditor internal dan staf keuangan, ditemukan etika pribadi dan profesional menjadi penentu apakah informasi keuangan disampaikan secara jujur atau tidak. Informan yang berprofesi sebagai Auditor Internal mengatakan, “Kami tahu beberapa informasi bisa dimanipulasi untuk menyesuaikan target, tetapi saya pribadi merasa tidak nyaman untuk itu meskipun tekanan dari manajemen ada.” Temuan ini menekankan kesadaran etis individual dalam menjaga integritas laporan keuangan. Meskipun struktur tata kelola dapat menciptakan sistem kontrol, namun keputusan akhir tetap bergantung pada nilai-nilai yang dipegang oleh pelaku pelaporan. Sejalan dengan studi Adams dan McNicholas (2007) yang menyatakan pelaporan keuangan yang etis dipengaruhi oleh norma profesional, pelatihan etika, dan budaya organisasi.

Temuan 3: Transparansi sebagai Citra, Bukan Nilai yang Diperjuangkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dari divisi pelaporan keuangan menyebut bahwa, “Transparansi itu penting, tapi kadang hanya sebatas bagaimana kita menyampaikan informasi yang bagus ke pasar, meskipun di baliknya tidak semua data dibuka.” Fenomena ini memperlihatkan bahwa transparansi dimaknai secara sempit sebagai strategi komunikasi investor, bukan pelaporan yang jujur dan menyeluruh. Hal ini selaras dengan studi Bushman dan Smith (2003) yang menyebutkan pelaporan keuangan bisa menjadi instrumen manipulatif untuk mengelola persepsi investor, bukan sebagai alat pengungkapan informasi yang objektif.

Temuan 4: Relasi Dinamis antara Struktur dan Agensi dalam Keterbukaan

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan merupakan hasil dari dialektika antara struktur kelembagaan (GCG) dan agensi personal (etika individu).

Praktik pelaporan keuangan yang transparan tidak bisa hanya bergantung pada struktur GCG atau nilai personal semata, melainkan keduanya harus bersinergi.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa transparansi tidak bisa dijamin hanya dengan struktur formal, tetapi membutuhkan internalisasi nilai-nilai etika dan integritas dalam budaya organisasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori pelaporan keuangan dengan menyoroti pentingnya pendekatan kualitatif untuk menangkap realitas sosial dan dilema moral yang tersembunyi di balik laporan keuangan perusahaan publik.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan laporan keuangan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari hubungan kompleks antara tata kelola perusahaan dan etika profesional. GCG memberikan kerangka kontrol dan struktur, sedangkan etika memberikan kompas moral dalam menjalankan fungsi tersebut. Ketika kedua aspek ini hadir secara simultan dan sinergis, keterbukaan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi menjadi budaya organisasi.

Temuan Mendukung dan Penyimpangan Teori

a. GCG Simbolik: Antara Kepatuhan Formal dan Makna Substansial

Temuan: banyak perusahaan menjalankan GCG hanya untuk memenuhi formalitas regulasi (misalnya rapat dewan hanya untuk memenuhi jadwal), bukan sebagai mekanisme kontrol substansial.

Kesesuaian dengan teori: Temuan ini mendukung Teori Institusional (DiMaggio & Powell, 1983), yang menyatakan bahwa organisasi cenderung meniru praktik formal demi mendapatkan legitimasi eksternal, bukan karena keyakinan terhadap nilai substansial dari praktik tersebut. Ini juga sesuai dengan temuan Michelin & Parbonetti (2012) yang menyatakan bahwa pelaksanaan GCG sering hanya sebagai simbol.

“Organisasi sering kali mengadopsi struktur formal bukan untuk efisiensi, tetapi untuk mendapatkan legitimasi dari lingkungan eksternal” – DiMaggio & Powell (1983)

Penyimpangan teori: temuan ini menyimpang dari ekspektasi dalam Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), yang berasumsi bahwa struktur GCG secara otomatis mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur tanpa internalisasi nilai tidak cukup efektif.

b. Etika Profesional sebagai Batas Moral Pelaporan

Temuan: Etika individu terbukti menjadi batas moral yang mengontrol keputusan pelaporan saat menghadapi tekanan internal. Beberapa informan menolak manipulasi meski diberi tekanan.

Kesesuaian teori: temuan ini mendukung Deontological Ethics (Kant, 1785) yang menekankan bahwa tindakan etis dilakukan atas dasar kewajiban moral, bukan semata hasil atau konsekuensinya. Juga sejalan dengan Theory of Moral Development (Rest, 1986), yang menyatakan bahwa keputusan etis ditentukan oleh tingkat perkembangan moral dan lingkungan organisasi.

“*Moral reasoning is influenced by both personal development and the ethical climate of the organization*” – Rest (1986)

Penyimpangan teori: Tidak terdapat penyimpangan signifikan, tetapi temuan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur tata kelola lemah, etika individu tetap mampu mencegah pelanggaran, menyoroti kekuatan agensi individu yang kadang diabaikan dalam model strukturalis seperti *Agency Theory*.

c. Transparansi sebagai Citra, Bukan Nilai Substansial

Temuan: transparansi sering dijalankan sebagai strategi untuk menciptakan citra positif bagi investor, bukan untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya.

Kesesuaian teori: Temuan ini sejalan dengan *Signaling Theory* (Spence, 1973), yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai sinyal kepada pasar, dan bisa memilih sinyal yang "menguntungkan" meskipun tidak selalu merepresentasikan kebenaran.

"Signals can be manipulated to influence perception even when they do not reflect reality." – Spence (1973)

Penyimpangan teori: temuan ini menyimpang dari nilai-nilai dasar Stakeholder Theory (Freeman, 1984), yang mengasumsikan bahwa keterbukaan laporan keuangan harus melayani semua pemangku kepentingan, bukan hanya pasar/modal.

d. Sinergi GCG dan Etika: Relasi Struktur dan Agensi

Temuan: Keterbukaan laporan keuangan merupakan hasil interaksi antara struktur formal (GCG) dan nilai-nilai individu (etika). Keduanya harus berjalan beriringan untuk menghasilkan transparansi yang sejati.

Kesesuaian teori: Temuan ini mendukung sintesis antara pendekatan struktural (*Agency Theory*) dan pendekatan normatif (*Ethical Theories*). Juga sejalan dengan teori hybrid seperti Davis et al. (1997) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap organisasi meningkat jika mekanisme formal dan nilai etika individu selaras.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan empat temuan utama yang merepresentasikan dinamika hubungan antara tata kelola perusahaan, etika profesional, dan keterbukaan laporan keuangan pada perusahaan *go public* di Indonesia. Temuan pertama menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) masih bersifat simbolik. Informan menyatakan bahwa rapat dewan komisaris dan komite audit lebih sering dijalankan untuk memenuhi kewajiban regulasi ketimbang sebagai forum pengambilan keputusan yang mendorong transparansi. GCG berfungsi sebagai ritual administratif yang memperlemah fungsi pengawasan dan akuntabilitas (Michelon & Parbonetti, 2012; DiMaggio & Powell, 1983; Utama, 2019).

Temuan kedua menegaskan peran etika profesional dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Informan dari divisi keuangan dan audit internal menekankan bahwa keputusan untuk menyajikan informasi secara jujur dipengaruhi oleh kesadaran moral individu, terutama saat menghadapi tekanan manajerial. Etika menjadi moral yang menentukan apakah pelaporan dilakukan secara benar, dan pelatihan serta budaya organisasi turut membentuk karakter etis pelaku pelaporan (Adams & McNicholas, 2007; Rest, 1986; Suryanto & Kisman, 2020).

Temuan ketiga mengindikasikan bahwa transparansi sering dipandang sebagai citra publik daripada nilai yang benar-benar diperjuangkan. Informasi keuangan disampaikan secara selektif dengan tujuan membentuk persepsi positif pasar, sementara aspek-aspek yang kurang menguntungkan kerap disembunyikan. Transparansi dalam hal ini bukan refleksi dari kejujuran, melainkan strategi komunikasi investor (Bushman & Smith, 2003; Ho & Wong, 2001).

Temuan keempat menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan merupakan hasil dari relasi dinamis antara struktur formal (GCG) dan agensi personal (etika individu). Struktur tanpa dukungan nilai personal cenderung tidak efektif, dan etika tanpa struktur cenderung tidak memiliki kekuatan sistemik. Keterbukaan yang sejati hanya bisa dicapai bila keduanya hadir secara sinergis dalam praktik organisasi (Davis et al., 1997; Lisic et al., 2019).

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tata kelola perusahaan dan etika profesional. Ketika GCG hanya dijalankan secara simbolik dan nilai etika tidak terinternalisasi, maka transparansi hanya menjadi ilusi belaka. Namun, bila keduanya bersinergi secara sejati, keterbukaan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga nilai budaya organisasi yang mendorong pelaporan jujur, akurat, dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengaruh tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) dan etika profesional memengaruhi keterbukaan laporan keuangan di perusahaan *go public* di Indonesia. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pelaku internal perusahaan terdiri dari manajemen keuangan, auditor internal, dan komite audit dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan dan etika profesional berperan penting dalam membentuk kualitas keterbukaan laporan keuangan. Namun, penerapan GCG sering kali diterapkan secara administratif demi memenuhi regulasi, bukan sebagai penggerak transparansi sejati. Hal ini menunjukkan bahwa sistem GCG belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, etika profesional juga berfungsi sebagai batas moral individu, dalam menghadapi tekanan organisasi yang dapat memicu pelaporan yang tidak jujur.

Hasil penelitian ini memperkuat teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983) dan temuan Bushman dan Smith (2003), bahwa pelaporan keuangan dalam perusahaan publik seringkali terjebak dalam dilema antara legitimasi formal dan substansi transparansi. Namun, penelitian ini juga memperkaya teori pelaporan keuangan dengan menunjukkan bahwa transparansi tidak dapat hanya dijamin oleh struktur (GCG), tetapi membutuhkan sinergi dengan nilai-nilai etika profesional pada tingkat individu. Dengan demikian, penelitian ini berhasil tidak hanya mengonfirmasi teori yang ada, tetapi juga menawarkan pemaknaan baru bahwa kualitas pelaporan keuangan sangat ditentukan oleh interaksi antara struktur kelembagaan dan nilai-nilai etis internal, sebuah sintesis yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian kuantitatif ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat.

- a. Keterbatasan terletak pada cakupan informan yang terbatas hanya pada beberapa perusahaan *go public* yang bersedia berpartisipasi secara terbuka. Hal ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh praktik tata kelola dan etika profesional di berbagai sektor industri.
- b. Keterbatasan metodologis ini dilihat dari jumlah informan yang digunakan hanya mengambil 8 orang sebagai informan wawancara, sehingga hasil temuan tidak bisa hanya terbatas pada sampel informan yang digunakan.
- c. Keterbatasan teoritis muncul dari minimnya model teoretis yang secara eksplisit menghubungkan GCG, etika profesional, dan keterbukaan pelaporan, sehingga pembahasan lebih eksploratif dan tanpa kerangka konseptual yang sistematis.

Keterbatasan-keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan memperluas jumlah informan lintas sektor industri, menggunakan metode campuran (*mixed methods*) untuk memperkuat hasil, serta mengembangkan kerangka konseptual yang lebih terstruktur dalam menjelaskan keterkaitan antara struktur, nilai, dan praktik pelaporan.

Implikasi Penelitian

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis bagi para pelaku organisasi, pembuat kebijakan, dan regulator.

- a. Perusahaan *go public* perlu mengembangkan pendekatan internalisasi GCG yang lebih substansial, bukan hanya pemenuhan formalitas regulasi. Ini dapat diwujudkan melalui penguatan peran komite audit, pelatihan etika, dan evaluasi berkala atas efektivitas pelaksanaan GCG.
- b. Penting bagi organisasi untuk memperkuat budaya etis melalui sistem insentif, proteksi bagi individu yang bersikap etis, serta menyediakan ruang dialog etika untuk menghadapi dilema pelaporan. Otoritas seperti OJK juga disarankan untuk tidak hanya memantau laporan GCG, tetapi menilai secara lebih mendalam kualitas substansi pelaksanaannya.

Implikasi Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan teori pelaporan keuangan dan teori tata kelola perusahaan dengan menyoroti pentingnya dimensi etika profesional sebagai penghubung antara struktur dan perilaku pelaporan. Penelitian ini juga mengusulkan sintesis teoritis baru bahwa transparansi hanya dapat dicapai jika terjadi integrasi antara regulasi kelembagaan dan moralitas individu. Temuan ini membuka ruang bagi studi selanjutnya untuk mengembangkan kerangka kerja integratif dalam menjelaskan kualitas pelaporan keuangan dengan variabel yang berbeda dan lebih kompleks agar dapat menginterpretasikan kondisi sebenarnya yang terjadi pada perusahaan.

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu memperhatikan praktik *corporate governance* yang baik. Selain itu, perusahaan-perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi praktik *corporate governance* dan kualitas laporan keuangan. Dengan menerapkan praktik *corporate governance* yang baik, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memperkuat posisi mereka di pasar, meningkatkan kinerja keuangan, dan membangun reputasi yang baik di mata investor dan *stakeholders*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A. (2004). The ethical, social and environmental reporting-performance portrayal gap. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(5), 731–757. <https://doi.org/10.1108/09513570410567791>
- Adams, C. A., & McNicholas, P. (2007). Making a difference: Sustainability reporting, accountability and organisational change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(3), 382–402. <https://doi.org/10.1108/09513570710748553>
- Ananda, F. A., & Mardijuwono, A. W. (2022). Etika profesional akuntan dan kualitas laporan keuangan: Perspektif organisasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 19(1), 56–70. <https://doi.org/10.24912/jiakun.v19i1.119>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (14th ed.). Pearson Education.
- Beekes, W., & Brown, P. (2006). Do better-governed Australian firms make more informative disclosures? *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(3–4), 422–450. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.00614.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2003). Transparency, financial accounting information, and corporate governance. *FRBNY Economic Policy Review*, 9(1), 65–87.

- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Sage Publications.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Hapsari, R., & Dewi, A. (2023). Efektivitas Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 23–36. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.02>
- Ho, S. M. S., & Wong, K. S. (2001). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10(2), 139–156. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(01\)00041-6](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(01)00041-6)
- IFAC. (2022). *IESBA Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants*. International Federation of Accountants. <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Handbook-2022.pdf>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaptein, M., & Schwartz, M. S. (2008). The effectiveness of business codes: A critical examination of existing studies and the development of an integrated research model. *Journal of Business Ethics*, 77(2), 111–127. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9305-0>
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (Modern translation ed.). Harper & Row.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Lisic, L. L., Neal, T. L., Zhang, I. X., & Zhang, Y. (2019). CEO power, corporate culture, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 67(1), 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.003>
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. *Journal of Management & Governance*, 16(3), 477–509. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3>
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Rest, J. R. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*. Praeger Publishers.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737–783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Suryanto, T., & Kisman, Z. (2020). Professional ethics and financial statement fraud: An Indonesian perspective. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 456–469. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Utama, S. (2019). Tantangan penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia: Studi pada perusahaan keluarga dan BUMN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 123–138. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.07>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yusniar, F., & Firmansyah, R. (2022). Pengaruh corporate governance terhadap transparansi pelaporan keuangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 88–102. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.1.07>